



## Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bangkleyan Kecamatan Jati

**Rokhman Muhyiddin, Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si.**rokhmanmuhyiddin@students.unnes.ac.id, antari.ayu@mail.unes.ac.id<sup>✉</sup>

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel****Abstrak***Sejarah Artikel:*Diterima:  
28 Februari 2025Disetujui:  
31 Maret 2025  
Dipublikasikan:  
April 2025*Keywords:**Kesejahteraan,  
Pemanfaatan,  
Program Keluarga  
Harapan (PKH)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan PKH oleh KPM Desa Bangkleyan beragam sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, terdapat KPM yang memanfaatkan PKH untuk penambahan modal usaha, pemenuhan kebutuhan sekolah anak, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemenuhan gizi ibu hamil, pembelian perabotan rumah tangga yang telah rusak dan pembelian hewan ternak. Adanya PKH di Desa Bangkleyan telah memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat karena dapat menambah biaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

*Abstract*

*This research is motivated by the government's efforts to overcome poverty problems by providing social assistance, one of which is the Family Hope Program (PKH). The purpose of this study was to determine how the Family Hope Program (PKH) is utilized to improve the welfare of the people of Bangkleyan Village, Jati District, Blora Regency. The results of this study indicate that the utilization of PKH by KPM Bangkleyan Village varies according to the conditions of each family, there are KPM who utilize PKH to increase business capital, fulfill children's school needs, fulfill daily needs, fulfill pregnant women's nutrition, purchase damaged household furniture and purchase livestock. The PKH program in Bangkleyan Village has had a positive impact on community welfare by increasing the cost of meeting family needs.*

## PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi dan hampir dialami oleh semua Negara. Adanya kemiskinan ini tidak terlepas dari ketimpangan, ketidakmerataan, serta ketidakadilan social (Arifin, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2022), kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang kekurangan sumber daya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan kemiskinan di Indonesia, di antaranya adalah rendahnya Sumber Daya Alam (SDA), rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Secara teoritis, permasalahan kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yaitu taraf hidup masyarakat di sebuah Negara masih tergolong rendah, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Irvanasari et al. 2018). Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aeni et al., 2024).

Terdapat berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program ini harus bersyarat yakni masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS). Adanya program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Dengan program ini, diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan serta pendidikan agar mencapai masa depan yang lebih baik (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

Sejak tahun 2014, Program Keluarga Harapan (PKH) dilanjutkan di berbagai Kota/Kabupaten, salah satunya yakni Kabupaten Blora. Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati merupakan salah satu Desa penerima bantuan sosial PKH. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022), beberapa sasaran dari penerima bantuan ini yakni pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, dukungan untuk pertumbuhan anak usia dini (0-6 tahun), bantuan biaya pendidikan untuk siswa SD, SMP, dan SMA, bantuan untuk lansia, serta bantuan untuk penyandang disabilitas. Berikut merupakan angka penderita kekurangan gizi masyarakat Desa Bangkleyan.

**Tabel 1.** Jumlah Warga Penderita Kekurangan Gizi Menurut Desa/Kelurahan  
Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	2023
1.	Bangkleyan	74
2.	Gempol	25
3.	Kepoh	24
4.	Pelem	27
5.	Jegong	11
6.	Jati	25
7.	Singget	19
8.	Gabusam	58
9.	Doplang	40
10.	Randulawang	28
11.	Tobo	19
12.	Pengkoljagong	7

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2024)

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah warga Desa Bangkleyan yang menderita kekurangan gizi sebanyak 74 orang dan merupakan jumlah tertinggi se Kecamatan Jati. Hal tersebut menandakan bahwa bantuan sosial PKH di Desa Bangkleyan sangat diperlukan agar permasalahan kekurangan gizi di wilayah tersebut berkurang.

Seiring dengan berlangsungnya program-program Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora (2024) kemiskinan di Kabupaten Blora terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora mencapai 11,53% (28.473 Kepala Keluarga). Kemudian pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,04% sehingga menjadi 11,49% (28.375 Kepala Keluarga). Adanya penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut, menjadi bukti bahwa peran Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Blora dapat menurunkan permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut namun belum signifikan dikarenakan persentase penurunan kemiskinan masih tergolong rendah. Rendahnya penurunan kemiskinan di Kabupaten Blora dapat terjadi karena penggunaan bantuan sosial di beberapa daerah yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Indikator yang digunakan untuk melihat kebermanfaatan dari penyaluran dana bansos adalah kecukupan rumah tangga penerima bantuan apakah dana bansos dapat memenuhi kebutuhan. Selain itu, sebagian penerima juga memanfaatkan dana bansos untuk modal usaha warung agar pendapatan bertambah (Rumengan, 2022). Pemanfaatan dana bansos terutama Program Keluarga Harapan (PKH) oleh masyarakat berbeda-beda sesuai dengan pola konsumsi dari penerima manfaat tersebut (Mayang, 2019). Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Robert K.Merton dalam (Rizzer & Goodman, 2014), yaitu teori Fungsional Struktural. Teori ini melihat bantuan sosial sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini, PKH menjadi sistem yang memiliki peran dan fungsi dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Marton, permasalahan sosial seperti kemiskinan dapat diatasi melalui bantuan sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan sosial (Rizzer & Goodman, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mencoba untuk mengidentifikasi mengenai

bagaimana pemanfaatan Program Keluarga Hraapan (PKH) di Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, serta apa dampak dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat.

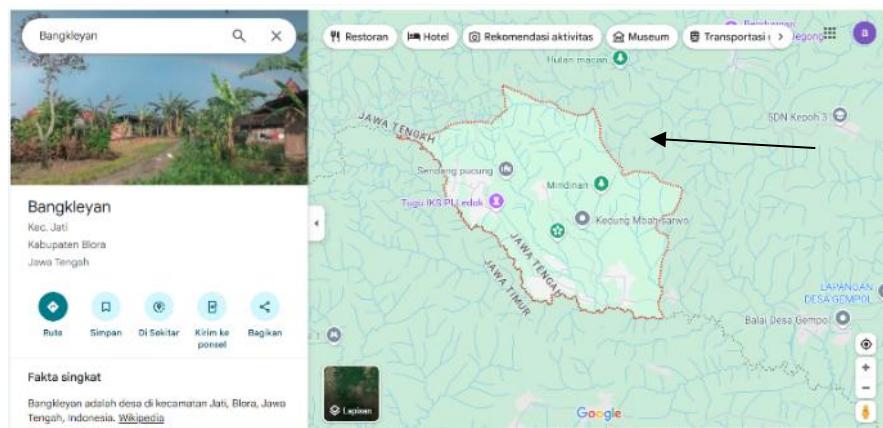
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan sosial oleh masyarakat Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora dalam meningkatkan kesejahteraan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bangkleyan yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH). Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan dengan ciri tertentu sehingga benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan utama yaitu 4 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mewakili kriteria penerima PKH, serta informan pendukung yaitu 1 orang pendamping PKH dan Kepala Desa Bangkleyan. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data statistik Kabupaten Blora dan data pendamping PKH Desa Bangkleyan. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap waawancara peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana pelaksanaan PKH, pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM dan peran pendamping PKH di Desa Bangkleyan. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana perilaku KPM dalam memanfaatkan bantuan sosial PKH. Terakhir, pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh melalui jurnal terdahulu, data pendamping PKH terkait jumlah KPM Desa Bangkleyan, serta BPS terkait jumlah penderita kekurangan gizi di Desa Bangkleyan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Pelaksanaan PKH di Desa Bangkleyan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Blora khususnya Kecamatan Jati telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga pra-sejahtera atau keluarga yang memiliki ekonomi rendah. Berikut merupakan peta Lokasi Desa Bangkleyan:



**Gambar 1.** Lokasi Penelitian Desa Bangkleyan  
(Sumber: *Google Maps*)

Berdasarkan pedoman pelaksanaan PKH oleh Kementerian Sosial, kriteria penerima PKH terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Kesehatan ditujukan untuk ibu hamil dan balita
2. Pendidikan ditujukan untuk anak Sekolah Dasar/sederajat yang berusia >6 tahun, anak SMP yang berusia >12 tahun, dan anak SMA yang berusia >15 tahun
3. Kesejahteraan ditujukan untuk lanjut usia (lebih dari 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Bangkleyan mencapai 290 keluarga. Dengan rincian per dukuh sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data KPM Desa Bangkleyan

Dukuh	KPM
Plosorejo	30
Bangkleyan	21
Kedungringin	18
Bedegan	25
Sambirejo	28
Pentuk	27
Mundu	34
Pucung	22
Ledok	26
Sengon	31
Bendo	28
<b>Total</b>	<b>290</b>

(Sumber : Data Pendamping PKH Tahun 2024)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara informan, keluarga yang dipilih menjadi KPM ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini merupakan data penduduk pra-sejahtera dengan kemampuan ekonomi yang kurang atau rendah. Tahapan penentuan masyarakat masuk dalam DTKS adalah adanya usulan dari Kepala Dusun melalui Musyawarah Desa (Musdes), kemudian data usulan tersebut akan diinput oleh pemerintah Desa. Data usulan yang telah diinput akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Penentuan KPM di Desa Bangkleyan sudah sesuai prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah yakni penerima manfaat merupakan masyarakat dengan kriteria ibu hamil atau menyusui, anak sekolah dengan usia 6-15 tahun, dan lansia atau disabilitas yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Melansir dari *kemensos.go.id*, besaran nominal bantuan PKH yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam 1 tahun adalah sebagai berikut:

1. Ibu hamil = Rp. 3.000.000 (750.000 per 3 bulan)
2. Balita = Rp. 3.000.000 (750.000 per 3 bulan)
3. Anak SD = Rp. 900.000 (225.000 per 3 bulan)
4. Anak SMP = Rp. 1.500.000 (375.000 per 3 bulan)
5. Anak SMA = Rp. 2.000.000 (500.000 per 3 bulan)
6. Disabilitas berat = Rp. 2.400.000 (600.000 per 3 bulan)
7. Lanjut usia = Rp. 2.400.000 (600.000 per 3 bulan)

Menurut informasi dari Pak Bima selaku pendamping PKH Desa Bangkleyan, penyaluran bantuan PKH dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Besaran penerimaan PKH setiap 3 bulan

sekali merupakan total nominal satu tahun dibagi 4x penyaluran. Pemberian PKH didasarkan pada banyaknya jumlah KPM dalam satu KK, misalnya dalam satu KK terdapat ibu hamil dan anak SMP maka besaran PKH yang diterima adalah 1.125.000 per 3 bulan sekali ( $750.000 + 375.000$ ). Dalam penyaluran PKH, pemerintah memberikan fasilitas kartu rekening yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan 1 per Kepala Keluarga. Adanya fasilitas KKS ini diharapkan mampu meminimalisir adanya tindakan kecurangan penyalahgunaan dana bantuan baik dari pendamping PKH maupun pemerintah Desa setempat karena bantuan akan langsung masuk dalam rekening KKS masing-masing KPM. Menurut informasi dari semua KPM yang menjadi informan pada penelitian ini, bantuan PKH di Desa Bangkleyan disalurkan rutin setiap 3 bulan sekali meskipun tanggal penyaluran pada rekening KKS KPM tidak pasti. Pendamping PKH melalui whatsapp grup akan memberitahu kepada KPM apabila bantuan telah masuk pada rekening KKS, bagi KPM yang tidak memiliki whatsapp akan diberitahu oleh KPM lainnya. Penyaluran PKH di Desa Bangkleyan tidak dipotong biaya apapun. Rata-rata KPM Desa Bangkleyan menambil bantuan PKH melalui Brilink terdekat, sehingga harus membayar biaya admin pengambilan uang.

### **Kendala Pelaksanaan PKH di Desa Bangkleyan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangkleyan tentu memiliki kendala. Salah satu kendala dalam pelaksanaan PKH di Desa Bangkleyan adalah masih terdapat beberapa warga yang mengeluhkan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Menurut informasi yang diperoleh dari Pak Mulyono selaku Kepala Desa Bangkleyan, adanya bantuan yang tidak tepat ini dikarenakan verifikasi data yang lama. Data yang diusulkan oleh pemerintah Desa akan disandingkan dengan data hasil sensus oleh Badan Pusat Statistik dan pendamping PKH melalui pemutakhiran data. Hasil data baik dari usulan desa, BPS, dan pendamping PKH kemudian akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Data yang disetujui oleh Kementerian Sosial akan masuk pada DTKS dan berhak menerima bantuan. Pada pelaksanaannya, data yang telah diverifikasi ini dapat dipergunakan kurang lebih 10 tahun kemudian. Jangka waktu pembaruan data DTKS yang terlalu lama inilah yang menjadi faktor bantuan sosial tidak tepat sasaran karena masyarakat yang dulunya memiliki status prasejahtera dan sekarang sudah sejahtera masih mendapat bantuan tersebut.

### **Pemanfaatan PKH di Desa Bangkleyan**

Menurut Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan. Adanya PKH diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM Desa Bangkleyan bervariasi sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga.

Ibu Partini (65 tahun), merupakan penerima PKH dengan kategori lansia yang berprofesi sebagai penjual nasi pecel. Informan merupakan KPM sejak tahun 2020 dengan anggota keluarga sebanyak 2 yakni informan dan suami yang berusia 67 tahun. Dalam sehari – hari, bu Partini membantu suami yang berprofesi sebagai petani dengan berjualan nasi pecel. Besaran bantuan PKH yang diterima oleh bu Partini dalam 1 tahun adalah Rp. 4.800.000, sehingga setiap 3 bulan bu Partini menerima Rp. 1.200.000. Berdasarkan wawancara dengan Bu Partini, informan mengatakan bahwa pemanfaatan bantuan PKH digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan modal untuk berjualan, seperti membeli beras, tepung untuk bahan gorengan, dan gula. Menurut bu Partini, bantuan PKH sangat bermanfaat bagi perekonomian keluarga.

Pak Tarmuji (46 tahun), merupakan penerima PKH yang berprofesi sebagai petani dengan 4 anggota keluarga. Pak Tarmuji merupakan KPM kategori anak sekolah, yaitu SD dan SMP. Menurut informan, adanya PKH dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga.

Besaran nominal PKH yang diterima Pak Tarmuji adalah Rp. 2.400.000 (600.000 per 3 bulan), nominal ini didapatkan dari jumlah KPM SD dan SMP. Menurut informasi dari Pak Tarmuji, dalam memanfaatkan bantuan PKH diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak terlebih dahulu, seperti membayar LKS, membeli buku, sepatu, dan tas. Sisa dari pembelian tersebut akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan seperti kopi, bumbu dapur, dan gula. Penyaluran PKH dilakukan 4x dalam satu tahun, sedangkan pembelian peralatan sekolah anak hanya 1x dalam satu tahun sehingga saat PKH cair pada periode selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pengerjaan penanaman jagung. Pemanfaatan PKH oleh Pak Tarmuji juga pernah dibelikan kambing saat harga kambing murah sebagai tabungan untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga.

Bu Sujini (41 tahun), merupakan KPM yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani demi membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bu Sujini merupakan KPM dengan kategori anak sekolah SD. Nominal bantuan PKH yang diterima oleh bu Sujini adalah Rp. 900.000 dalam satu tahun (225.000 per 3 bulan). Menurut informasi dari Bu Sujini, dalam memanfaatkan bantuan PKH diutamakan untuk kebutuhan sekolah anak mengingat jumlah bantuan yang tergolong paling rendah dibandingkan dengan kategori KPM lainnya. Sebagian bantuan tersebut ditabungkan ke sekolah dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila terdapat kegiatan sekolah yang memerlukan uang seperti study tour dan pentas seni mengingat bahwa buruh tani tidak setiap hari bekerja dan mendapat penghasilan.

Bu Yani (40 tahun), merupakan KPM dengan kategori ibu hamil dan menyusui serta balita. Kegiatan sehari – hari bu Yani adalah ibu rumah tangga dan suami berprofesi sebagai buruh tani. Menurut informasi dari bu Yani, adanya PKH sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan selama hamil hingga melahirkan. Bu Yani memanfaatkan PKH untuk biaya USG saat hamil dan pemenuhan gizi selama hamil seperti susu. Saat ini, bantuan PKH juga dimanfaatkan oleh bu Yani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras dan kebutuhan anak seperti pampers dan susu. Pemanfaatan PKH oleh bu Yani juga digunakan untuk membeli hewan ternak seperti kambing karena pendapatan buruh tani yang tidak menentu sehingga apabila ada keperluan yang mendadak kambing tersebut dapat dijual. Pemanfaatan PKH oleh bu Yani terkadang juga digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga yang telah rusak seperti magicom, setrika, dan panci.

Berdasarkan data yang sudah dideskripsikan, maka secara ringkas profil KPM serta pemanfaatan bantuan Program PKH dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Pemanfaatan PKH oleh KPM Desa Bangkleyan

Nama KPM	Pekerjaan	Kategori KPM	Jumlah Anggota Keluarga	Pemanfaatan	Lama Bekerja (tahun)
Partini	Penjual nasi pecel	Lansia	2	Penambah modal usaha (beras, gula, tepung) dan mencukupi kebutuhan	3
Tarmuji	Petani	Anak sekolah	4	Pemenuhan kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari	4
Sujini	Buruh tani	Anak sekolah	3	Pemenuhan kebutuhan sekolah anak	3,5

Yani	Ibu rumah tangga	Ibu hamil	3	Pemenuhan gizi hamil dan pembelian hewan ternak	-
------	------------------	-----------	---	---	---

(Sumber : Data Hasil Wawancara, 2025)

Pemanfaatan (PKH) di Desa Bangkleyan beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Menurut Pak Mulyono selaku Kepala Desa Bangkleyan, pemanfaatan bantuan PKH yang beragam ini perlu diawasi, baik oleh pemerintah desa maupun pendamping PKH. Pengawasan terhadap pemanfaatan PKH bertujuan untuk meminimalisir penggunaan bantuan yang tidak sesuai. Pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan dapat dilakukan oleh pendamping PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Kajian mengenai pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangkleyan ditelaah melalui pendekatan Teori Fungsional Struktural yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini memandang bantuan sosial sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Hasil dari penelitian di lapangan, pemanfaatan PKH di Desa Bangkleyan sesuai dengan teori fungsional struktural yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Pemanfaatan PKH di Desa Bangkleyan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu melalui pemenuhan biaya sekolah, penambahan modal usaha, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta pembelian hewan ternak.

### Peran Pendamping PKH

Menurut Habibullah (2011), pendamping PKH memiliki peran yang berhubungan dengan motivasi serta dukungan kepada masyarakat. Menurut Kementerian Sosial, pendamping PKH bertugas untuk sosialisasi PKH kepada pemerintah Desa terkait PKH, melakukan validasi data calon KPM, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan pendampingan KPM, dan melakukan pemutakhiran data KPM apabila terjadi perubahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pak Bima, bahwa pendamping PKH Desa Bangkleyan telah bertugas sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Sebelum bantuan PKH diberikan kepada KPM, terlebih dahulu pendamping PKH akan melakukan validasi data dengan sensus ke rumah calon KPM.

Data yang telah divalidasi pendamping PKH ini tidak langsung dapat dipergunakan, namun data harus disandingkan dengan DTKS usulan Desa dan hasil sensus oleh Badan Pusat Statistik. Ketiga data yang telah diusulkan oleh masing-masing instansi ini nantinya akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Setiap satu bulan sekali pendamping PKH melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Bangkleyan yang setiap bulannya berpindah di setiap Dusun. Dalam pertemuan ini, masyarakat diedukasi dan dimotivasi untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan bagaimana mengatur keuangan keluarga misalnya dengan memberi edukasi terkait pentingnya keseimbangan gizi untuk ibu hamil dan membuat anggaran belanja rumah tangga.

Adanya pertemuan P2K2 oleh pendamping PKH terhadap KPM ini didukung oleh Kepala Desa Bangkleyan dan diharapkan dapat terus berjalan agar ada pengawasan untuk penyaluran dan penggunaan dana bantuan oleh warga agar tidak dipersalah gunakan serta mengedukasi masyarakat Desa Bangkleyan dalam mengelola keuangan keluarga. Peran pendamping PKH dalam P2K2 sangat diperlukan guna perubahan perilaku ekonomi keluarga yang baik. Adanya perubahan perilaku keluarga yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan keuangan yang baik, pendidikan, dan kesehatan. Pendamping PKH merupakan petugas yang berhubungan langsung dengan KPM sehingga pendamping PKH juga memberikan informasi terkait penyaluran PKH dan kendala yang dihadapi oleh

KPM. Selain itu, dalam P2K2 pendamping PKH juga membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam hal ini, pendamping berperan untuk mediasi terkait konflik sehingga membantu KPM dalam mencari Solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

Kajian mengenai peran pendamping PKH ditelaah melalui teori Fungsional Struktural oleh Robert K. Merton. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini pendamping PKH berpesan sebagai *fasilitator*, *edukator*, *motivator*, dan *mediator*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran pendamping PKH di Desa Bangkleyan telah sesuai dengan teori Fungsional Struktural yang dikembangkan oleh Robert K. Merton.

Sebagai *fasilitator* pendamping PKH membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengakses layanan yang telah disediakan oleh PKH, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai *edukator*, pendamping PKH telah memberikan informasi serta pengetahuan terkait bagaimana pemanfaatan PKH, pengelolaan keuangan keluarga, dan pentingnya keseimbangan gizi untuk ibu hamil dan menyusui melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Bangkleyan. Dalam peran sebagai *motivator*, pendamping PKH telah mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengubah perilaku keluarga yang lebih bai, KPM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan keuangan yang baik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pendamping PKH di Desa Bangkleyan membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, termasuk mediasi dalam konflik atau permasalahan internal keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping PKH Desa Bangkleyan telah berperan sebagai *mediator*.

### **Dampak PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bangkleyan**

Menurut Khoerunisa (2023), dampak merupakan segala sesuatu yang ada akibat adanya suatu kejadian ataupun pembangunan yang ada didalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu perubahan yang berpengaruh baik positif maupun negatif. Bantuan sosial memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian (Gracenda, 2025). Agar PKH dapat memberikan dampak yang dapat terus meningkatkan kesejahteraan maka harus diintegrasikan dengan adanya pemberdayaan melalui P2K2 oleh pendamping PKH. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2022), adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut wawancara dengan informan, adanya PKH di Desa Bangkleyan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, penambahan modal usaha, dan dapat digunakan untuk membeli hewan ternak untuk tabungan keluarga. Informan sangat merasakan kebermanfaatan dari PKH yakni menambah biaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Pemanfaatan bantuan PKH menurut KPM Desa Bangkleyan juga membawa dampak terhadap pendidikan karena penerima dapat memanfaatkan bantuan untuk biaya pendidikan seperti uang saku dan pembayaran LKS. Melalui P2K2 oleh pendamping PKH, KPM dapat mengatur pengeluaran dan pengelolaan keuangan dengan baik. Adanya bantuan PKH juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, Pak Mulyono selaku Kepala Desa Bangkleyan mengkhawatirkan adanya perilaku ketergantungan terhadap PKH oleh KPM. Dalam rangka mengantisipasi ketergantungan tersebut, pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM di Desa Bangkleyan harus diawasi dan pelaksanaan P2K2 oleh pendamping harus rutin dilakukan agar KPM memiliki kemandirian dalam mencukupi perekonomian keluarga dan pemanfaatan PKH sesuai dengan tujuan agar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kajian mengenai dampak PKH terhadap kesejahteraan sosial ditelaah menggunakan pendekatan teori Fungsional Struktural yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini

memandang dampak bantuan sosial dari 3 aspek, yaitu fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi. Dalam perspektif Marton, bantuan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan serta pendidikan. Namun, apabila program bantuan sosial tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, mungkin akan menimbulkan dampak ketergantungan oleh masyarakat terhadap pemerintah sehingga muncul dampak laten dari bantuan sosial. Apabila bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran maka dapat menimbulkan dampak disfungsi.

Hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangkleyan memberikan dampak sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Pada aspek manifes, PKH memberikan dampak dalam mengurangi kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, meningkatkan akses kesehatan serta pendidikan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangkleyan, adanya PKH juga dikhawatirkan akan menimbulkan sifat ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, dalam rangka mengantisipasi adanya ketergantungan diperlukan pengawasan serta edukasi oleh pendamping PKH melalui P2K2. Hal tersebut menunjukkan dampak PKH dalam aspek laten atau ketergantungan. Dari sisi kendala, terdapat beberapa masyarakat yang mengeluhkan bahwa PKH di Desa Bangkleyan tidak tepat sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan disfungsi dari adanya bantuan sosial.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangkleyan telah sesuai prosedur oleh Kementerian Sosial yaitu KPM merupakan masyarakat dalam kategori ibu hamil dan menyusui, anak sekolah usia 6-15 tahun, serta lansia atau disabilitas yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS), namun masih terdapat beberapa penyaluran yang tidak tepat sasaran akibat jangka waktu pemutakhiran data validasi DTKS melalui sensus yang lama. Sebagian besar KPM Desa Bangkleyan telah memanfaatkan bantuan sosial PKH sesuai dengan tujuan PKH. Pemanfaatan bantuan PKH di Desa Bangkleyan oleh KPM beragam sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Terdapat KPM yang memanfaatkan bantuan sebagai penambah modal usaha, pemenuhan kebutuhan sekolah anak, pemenuhan gizi ibu hamil, pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti gula, beras, dan kopi, pembelian hewan ternak sebagai tabungan, dan pembelian perabotan rumah tangga yang telah rusak.

Bantuan PKH membawa dampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bangkleyan, yakni menambah biaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan sekolah, akses Pendidikan, serta dapat mengubah perilaku pengeluaran dan pengelolaan uang yang lebih baik. Adanya PKH juga membawa dampak negatif bagi KPM yaitu munculnya sikap ketergantungan terhadap bantuan. Melalui P2K2, diharapkan KPM dapat memperbaiki pengeluaran dan pengelolaan keuangan serta dapat meningkatkan potensi keluarga untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N.S. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora* 7(1): 30–39.
- Arifin, H. (2023). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Sirandorung. *E-Theses*. UIN Padangsidiimpuan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. (2023). Profil Kemiskinan di Kabupaten Blora 2023. <https://blorakab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/18/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. (2024). Kecamatan Jati dalam Angka 2023. [https://blorakab.bps.go.id/publication/2024/09/26/](https://blorakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/)

- Gracenda, Febina Br. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*.
- Harahap, Mutia. (2022). Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Universitas Medan Area.
- Irvanasari, F. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung. *Jurnal Caraka Prabu* 2(2): 175–89.
- Khoerunisa, Fitri et al. (2023). Dampak Program Bantuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. *Comm-Edu (Community Education Journal)* 6(2): 174–89.  
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/17349>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Perlindungan Sosial.  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10>
- Marlinda, C. (2022). Effectiveness and Implications of Provision of Covid-19 Assistance for Msme in Tanjungpinang City. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6(2): 1442.
- Permendagri. (2020). Tujuan Pemberian Bantuan Sosial. <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/>
- Ritzer, G & Goodman, D. J. (2014). Teori Sosiologi (*Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*). Jakarta: Kreasi Wacana
- Rumengen. (2022). Pemanfaatan Program Pemerintah Bantuan Langsung Tunai di Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi* 18(3): 577–84.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.